



Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024

Fathol Bari

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy

Email: fathadv99@gmail.com

Abstract. *Preventing criminal acts of money politics in general elections is an important effort to maintain election integrity and the sustainability of democracy. The practice of money politics can threaten democratic principles, such as justice, participation and accountability. To overcome this problem, public education, information campaigns and community involvement play a crucial role in building public awareness of the dangers of money politics. This article discusses several key issues related to money politics, including factors that influence people to become involved in money politics, the negative impact of money politics on the integrity of elections and democracy, as well as effective strategies for building public awareness. Apart from that, this article also highlights the important role of public education, information campaigns and community involvement in preventing money politics in the 2024 elections. Through this collaborative effort, it is hoped that the public can be actively involved in honest, fair and transparent elections and avoid the rise of politics. Money.*

Keywords: *Money Politics, Elections, Election Integrity, Democracy*

Abstrak. Pencegahan tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum merupakan upaya penting dalam mempertahankan integritas pemilu dan keberlangsungan demokrasi. Praktik politik uang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan publik, kampanye informasi, dan pelibatan masyarakat memainkan peran krusial dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahayanya politik uang. Artikel ini membahas beberapa pokok persoalan yang bersangkutan dengan politik uang diantaranya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terlibat dalam politik uang, dampak negatif politik uang terhadap integritas pemilu dan demokrasi, serta strategi efektif untuk membangun kesadaran masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya peran pendidikan publik, kampanye informasi, dan pelibatan masyarakat dalam mencegah politik uang pada pemilu 2024. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pemilihan yang jujur, adil, dan transparan dan menghindari maraknya politik uang.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, Integritas Pemilu, Demokrasi

LATAR BELAKANG

Salah satu pilar utama demokrasi dalam sistem politik suatu negara adalah pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilu yang bebas dan adil merupakan fondasi utama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan, menghasilkan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang. Namun, praktik politik yang berkaitan dengan uang telah berkembang menjadi masalah besar di beberapa pemilu, mengancam integritas dan keberhasilan pemilu.

Politik uang mencakup praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau imbalan lainnya sebagai imbalan untuk mendapatkan suara atau mempengaruhi proses pemilihan. Praktik ini dapat melibatkan kandidat, partai politik, atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan atau menjaga kepentingan mereka. Karena politik uang memengaruhi keputusan pemilih dan mengabaikan program dan kebijakan yang diusung oleh calon, itu merusak demokrasi.

Langkah-langkah pencegahan yang menyeluruh diperlukan untuk mencegah politik uang yang merusak integritas pemilu. Membangun kesadaran publik tentang efek negatif dari politik uang dan pentingnya menjaga pemilu yang bersih dan adil adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan.

Komunikasi, pendidikan, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik uang. Untuk mencapai tujuan ini, berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan:

1. Pendidikan Publik: Memasukkan informasi tentang politik uang ke dalam program sekolah formal dan non-formal. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat mengadakan program pendidikan yang membantu siswa memahami pentingnya pemilu yang bersih dan bahaya politik uang. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil juga dapat mengadakan diskusi publik, lokakarya, atau seminar. "Pendidikan publik yang efektif tentang politik uang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pemilu,"

2. Kampanye Informasi: Menyebarkan informasi tentang praktik politik uang melalui kampanye berbasis komunitas, media sosial, dan media massa. Kampanye ini harus mencakup contoh-contoh nyata dari praktik politik uang, menunjukkan dampaknya terhadap demokrasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan yang bebas dari intervensi finansial. Kampanye informasi yang terarah dapat mengubah cara orang melihat politik uang dan meningkatkan kesadaran akan keadilan pemilu.
3. Pelibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu, melaporkan dugaan praktik politik yang berkaitan dengan uang, dan mendorong transparansi pendanaan kampanye politik. Sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi pengawas aktif dan memainkan peran penting dalam memastikan pemilu berlangsung dengan benar. "Pelibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu dapat berperan sebagai benteng pertahanan terhadap politik uang, karena meningkatkan pengawasan yang dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi,

Rumusan Masalah

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan kali pertama yang dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan umum Presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal guna pemilu dapat berjalan dengan baik dan berintegritas agar dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan jujur. Amanah dan jujur bagi seorang pemimpin menjadi sangat penting dan urgent dengan melihat kondisi Indonesia saat ini yang berada dalam darurat korupsi. Korupsi oleh seorang pejabat negara biasanya bermula pada saat pemilihan umum atau pilkada sehingga diperlukan kesadaran para kontestan pemilu dan masyarakat yang sadar akan bahaya dan dampak negatif dari politik uang. Diantara kajian masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apa saja bentuk praktik politik uang yang umum terjadi selama pemilu dan pilkada? dampak negatif dari politik uang terhadap integritas pemilu dan demokrasi serta bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Guna menjawab isu hukum dalam artikel ini, maka jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini guna menemukan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dikaji yaitu terkait Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. Diantara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, UUD NRI 1945, UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta beberapa regulasi lainnya yang terkait dengan objek yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Bentuk Praktik Politik Uang yang Umum Terjadi Selama Pemilu

Pemilihan umum seringkali menjadi momen krusial bagi para kandidat dan partai politik untuk memperoleh kekuasaan atau mempengaruhi hasil pemilihan. Praktik politik uang merupakan salah satu strategi yang sering digunakan dalam upaya tersebut. Praktik ini melibatkan memberikan atau menerima uang, barang, atau imbalan lainnya sebagai imbalan untuk mendapatkan suara atau mempengaruhi proses pemilihan. Beberapa bentuk praktik politik uang yang umum terjadi selama pemilu antara lain:

1. **Pembelian Suara:** Praktik ini melibatkan memberikan uang atau hadiah kepada pemilih dengan tujuan agar mereka memberikan suara kepada kandidat atau partai tertentu. Pemilih yang menerima uang atau hadiah ini diharapkan akan memilih calon yang telah memberikan imbalan tersebut. Contohnya, dana tunai yang diberikan kepada warga dalam pertemuan kampanye atau bantuan sosial yang diberikan dengan syarat memilih calon tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lehoucq pada tahun 2003, pembelian suara merupakan salah satu bentuk praktik politik uang yang umum terjadi selama pemilu di beberapa negara berkembang, dengan tujuan mempengaruhi preferensi pemilih.
2. **Pembiayaan Kampanye yang tidak Transparan:** Praktik politik uang juga terjadi melalui pembiayaan kampanye yang tidak transparan, di mana calon atau partai politik menerima dana yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau ilegal. Praktik

ini mengaburkan sumber pendanaan dan menghindari aturan pengungkapan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang tidak transparan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan melalui kampanye yang mahal atau menyebarkan propaganda yang tidak jujur. Dalam sebuah laporan oleh Alan dan Stephen pada tahun 2013, mereka mencatat bahwa pembiayaan kampanye yang tidak transparan merupakan salah satu bentuk politik uang yang sering terjadi di berbagai negara, dengan potensi merusak integritas pemilu.

3. Peredaran Uang di Kalangan Elit Politik: Praktik politik uang juga dapat terjadi melalui peredaran uang di kalangan elit politik, di mana kandidat atau partai politik yang memiliki akses ke sumber daya yang melimpah menggunakan uang untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini dapat berupa memberikan sumbangan besar-besaran kepada partai politik tertentu atau memberikan imbalan finansial kepada politisi yang memiliki pengaruh kuat guna mendapatkan dukungan politik atau pemilihan di internal partai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Slater dan Simmons pada tahun 2010, peredaran uang di kalangan elit politik merupakan bentuk praktik politik uang yang umum terjadi di beberapa negara, dengan tujuan memperkuat pengaruh politik dan mengamankan kepentingan ekonomi.
4. Penyalahgunaan Sumber Daya Publik: Praktik politik uang juga dapat terjadimelalui penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan politik. Hal ini dapat berupa penggunaan dana publik untuk kampanye politik, pemanfaatan fasilitas publik untuk kegiatan kampanye, atau pemakaian sumber daya pemerintah untuk memperoleh dukungan politik. Penyalahgunaan ini menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan dan menguntungkan kandidat atau partai yang memiliki kontrol terhadap sumber daya publik.

Menurut laporan dari Essex dan Goodman pada tahun 2020, penyalahgunaan sumber daya publik merupakan salah satu bentuk praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu dan menciderai prinsip demokrasi. Praktik politik uang dalam pemilu dapat merusak integritas dan keadilan pemilihan. Beberapa bentuk praktik yang umum terjadi meliputi pembelian suara, pembiayaan kampanye yang tidak transparan, peredaran uang di kalangan elit politik, dan penyalahgunaan sumber daya publik. Memahami bentuk-

bentuk praktik politik uang ini penting dalam upaya mencegah dan melawan politik uang dalam pemilu, sehingga pemilihan dapat berlangsung dengan adil, bebas, dan mewakili kehendak rakyat.

Dampak Negatif dari Politik Uang Terhadap Integritas Pemilu dan Demokrasi

Politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap integritas pemilu dan demokrasi. Praktik ini mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan transparansi dalam proses pemilihan. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang umum terjadi:

1. **Merusak Keadilan Pemilu:** Politik uang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemilihan. Ketika pemilih menerima uang atau hadiah sebagai imbalan untuk memberikan suara, maka keputusan mereka tidak lagi didasarkan pada pemahaman dan keyakinan politik yang jujur. Hal ini mengakibatkan distorsi dalam keputusan pemilih dan merusak prinsip keadilan dalam proses pemilihan. Praktik politik uang secara signifikan mengurangi kualitas keputusan pemilih dan merusak prinsip kesetaraan dalam pemilihan.
2. **Memicu Korupsi Politik:** Politik uang berpotensi memicu korupsi politik yang lebih luas. Ketika kandidat atau partai politik mengeluarkan uang besar untuk memenangkan pemilihan, mereka dapat berharap mendapatkan imbalan finansial atau keuntungan lainnya setelah memegang kekuasaan. Hal ini menciptakan siklus korupsi di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu mengungguli kepentingan publik, merusak integritas sistem politik dan lembaga pemerintahan. Praktik politik uang secara langsung terkait dengan meningkatnya tingkat korupsi politik di beberapa negara.
3. **Mengurangi Partisipasi Publik:** Politik uang dapat mengurangi partisipasi publik dalam proses pemilihan. Ketika pemilih merasa bahwa keputusan mereka tidak bernilai atau bahwa politik didominasi oleh kekuatan uang, mereka cenderung kehilangan kepercayaan dan minat untuk terlibat dalam pemilihan. Hal ini mengurangi partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan mengancam legitimasi demokrasi. Praktik politik uang yang meluas dapat menghasilkan penurunan partisipasi pemilih dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

4. Memperburuk Representasi Politik: Politik uang dapat memperburuk representasi politik yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat secara adil. Ketika kandidat atau partai politik yang memiliki sumber daya finansial lebih besar memiliki keunggulan dalam pemilihan, mereka dapat mendominasi panggung politik dan mengesampingkan suara-suara minoritas atau kelompok yang kurang berpengaruh. Hal ini menghasilkan ketidakseimbangan dalam representasi dan merusak prinsip demokrasi yang menghargai keanekaragaman dan partisipasi yang inklusif. Politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap representasi politik yang adil dan merusak prinsip demokrasi yang sehat.

Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu Serentak 2024

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu 2024 menjadi faktor penting dalam upaya mencegah praktik yang merusak integritas demokrasi. Kesadaran ini mencakup pemahaman masyarakat tentang bentuk praktik politik uang, dampak negatifnya, dan peran mereka dalam mencegah dan melawan praktik tersebut. Untuk lebih memahami tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu 2024, penelitian dan studi telah dilakukan. Studi oleh Dalton (2013) yang dilakukan di beberapa negara menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu masih cukup rendah. Sebagian besar responden tidak sepenuhnya memahami konsep politik uang dan dampaknya terhadap integritas pemilu. Mereka juga kurang menyadari bahwa politik uang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Di negara-negara Asia menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu berbeda-beda. Negara-negara dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang politik uang dan dampak negatifnya. Namun, masih ada sebagian besar masyarakat yang kurang terinformasi atau tidak peduli terhadap isu ini.

Pada tingkat lokal, di sebuah kota menemukan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik uang dalam pemilu, tingkat kesadaran masih relatif rendah. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami praktik politik uang atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara melaporkan atau melawan praktik tersebut.

Untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu 2024, diperlukan upaya yang komprehensif. Kampanye informasi, pendidikan publik, dan partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif. Menurut sebuah studi oleh Morgan (1998), kampanye informasi yang menggunakan media sosial, pemberitaan, dan acara publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik uang. Pendidikan publik juga penting untuk memberikan pengetahuan tentang praktik politik uang, dampaknya, dan pentingnya partisipasi yang jujur dan adil dalam pemilu.

Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Praktik Politik Uang

Partisipasi masyarakat dalam praktik politik uang dalam pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor ini meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi persepsi dan perilaku individu terkait politik uang. Untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam praktik politik uang, berbagai penelitian dan studi telah dilakukan.

1. **Kondisi Ekonomi:** Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam praktik politik uang. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, seperti pengangguran atau kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi, mereka mungkin cenderung lebih rentan terhadap tawaran atau penawaran uang dalam pemilu. Faktor ini terkait dengan kebutuhan dasar ekonomi dan upaya individu untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Kondisi ekonomi yang buruk cenderung meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik politik uang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
2. **Budaya dan Nilai-nilai Politik:** Budaya dan nilai-nilai politik dalam suatu masyarakat juga mempengaruhi partisipasi dalam politik uang. Misalnya, dalam budaya yang mementingkan kepatuhan dan relasi personal, praktik politik uang dapat dianggap sebagai bentuk norma atau cara yang diterima untuk memperoleh dukungan politik. Nilai-nilai yang menekankan pentingnya hubungan personal atau nepotisme dapat mendorong partisipasi dalam praktik politik uang. Budaya yang memperkuat norma-norma klijenelisme dan

patronase berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam praktik politik uang.

3. **Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Politik:** Tingkat pendidikan dan kesadaran politik juga mempengaruhi partisipasi dalam politik uang. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi politik uang terhadap integritas pemilu dan demokrasi. Mereka mungkin lebih kritis terhadap praktik tersebut dan memiliki motivasi yang lebih besar untuk mencegahnya. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih menyadari dampak negatif politik uang dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melawan praktik tersebut.
4. **Persepsi terhadap Kepatuhan Hukum:** Persepsi individu terhadap tingkat kepatuhan hukum dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi partisipasi dalam praktik politik uang. Jika individu percaya bahwa hukum dan aturan dalam pemilihan tidak ditegakkan dengan tegas atau bahwa pelanggaran tidak ditindaklanjuti, mereka mungkin merasa bahwa praktik politik uang adalah cara yang efektif untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Persepsi yang rendah terhadap kepatuhan hukum dapat meningkatkan partisipasi dalam praktik politik uang.

Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024

Membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah krusial dalam upaya mencegah dan melawan praktik politik uang pada pemilu 2024. Kesadaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik politik uang, dampak negatifnya terhadap demokrasi, serta pentingnya partisipasi yang jujur dan adil dalam pemilihan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait isu politik uang dalam pemilu.

1. **Kampanye Pendidikan Publik:** Kampanye pendidikan publik merupakan salah satu cara yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat terkait politik uang dalam pemilu. Melalui kampanye ini, informasi yang akurat dan relevan disampaikan kepada masyarakat mengenai praktik politik uang, konsekuensinya, dan pentingnya menjaga integritas pemilu. Kampanye tersebut

dapat melibatkan kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau diskusi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kampanye pendidikan publik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang politik uang dan memotivasi untuk melawan praktik tersebut.

2. Media Sosial dan Pemberitaan: Pemanfaatan media sosial dan pemberitaan juga penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap politik uang. Melalui platform media sosial, informasi dan pesan mengenai politik uang dapat dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, liputan media yang kritis dan objektif tentang praktik politik uang

Strategi Yang Efektif Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Politik Uang

Membangun kesadaran masyarakat tentang politik uang merupakan langkah penting dalam upaya mencegah praktik korupsi dan memastikan integritas dalam pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang telah terbukti efektif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang politik uang:

1. Kampanye Pendidikan Publik: Kampanye pendidikan publik yang terstruktur dan terarah dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun kesadaran masyarakat tentang politik uang. Kampanye ini dapat melibatkan pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat, menyediakan materi edukatif, dan mengadakan acara seperti seminar, lokakarya, dan diskusi publik. Kampanye pendidikan publik yang melibatkan berbagai pihak dan menggunakan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang.
2. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Pemilihan: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemilihan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang politik uang. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sosialisasi pemilih, pelatihan pengawas pemilu, dan partisipasi dalam forum diskusi tentang isu-isu terkait pemilihan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi yang adil dan jujur dalam

pemilihan. Pelibatan masyarakat dalam pemilihan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang politik uang dan memotivasi untuk mengambil tindakan yang tepat.

3. Pemanfaatan Media Sosial dan Teknologi Digital: Media sosial dan teknologi digital dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang politik uang. Melalui kampanye media sosial yang terorganisir dengan baik, pesan-pesan yang menyoroti praktik politik uang dan konsekuensinya dapat dengan cepat menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, platform online juga dapat digunakan untuk mengadakan kampanye crowdfunding atau donasi terbuka untuk mendukung kandidat yang berintegritas. Pemanfaatan media sosial dalam membangun kesadaran masyarakat tentang politik uang memiliki potensi besar dalam mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.
4. Kerjasama dengan Media Massa: Kerjasama dengan media massa merupakan strategi penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang politik uang. Melalui liputan yang objektif, kritis, dan mendalam tentang kasus politik uang serta konsekuensinya, media massa dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang praktik yang merugikan ini. Selain itu, media massa juga dapat menyediakan platform untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi dan debat terbuka tentang isu politik uang. Kerjasama yang baik antara organisasi anti-korupsi dan media massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik uang.

Peran Pendidikan Publik, Kampanye Informasi, Dan Pelibatan Masyarakat Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024

Pendidikan publik, kampanye informasi, dan pelibatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mencegah praktik politik uang yang merusak integritas pemilu. Dengan membangun kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang politik uang, strategi ini dapat menginspirasi partisipasi yang jujur dan adil dalam pemilihan serta meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi negatif dari praktik politik uang. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang peran dan manfaat dari pendidikan publik,

kampanye informasi, dan pelibatan masyarakat dalam mencegah politik uang pada pemilu 2024.

1. Pendidikan Publik: Pendidikan publik memiliki peran krusial dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang politik uang kepada masyarakat. Melalui program pendidikan formal atau informal, lembaga pendidikan dapat menyampaikan informasi tentang praktik politik uang, etika pemilihan, dan pentingnya menjaga integritas dalam proses demokrasi. Program pendidikan tersebut dapat mencakup kurikulum sekolah, lokakarya, seminar, dan kampanye pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendidikan publik yang terstruktur dan terarah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang dan memotivasi mereka untuk melawan praktik tersebut.
2. Kampanye Informasi: Kampanye informasi bertujuan untuk menyebarkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami kepada masyarakat tentang politik uang. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, brosur, dan poster. Pesan yang disampaikan dalam kampanye informasi harus menyoroti dampak negatif dari politik uang, merangsang kesadaran masyarakat, dan mengajak mereka untuk mengambil tindakan. Kampanye informasi yang efektif dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang politik uang dan memotivasi partisipasi yang jujur dalam pemilihan.
3. Pelibatan Masyarakat: Pelibatan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam proses pemilihan. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan dan pemantauan terhadap praktik politik uang. Beberapa bentuk pelibatan masyarakat yang efektif meliputi pembentukan kelompok pengawas pemilu, pertemuan warga, diskusi publik, dan forum interaktif untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait politik uang. Pelibatan masyarakat dalam pemilihan dapat membantu menciptakan kesadaran kolektif tentang politik uang dan memotivasi tindakan kolaboratif untuk mencegahnya.

Manfaat Dari Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlangsungan Demokrasi

Mencegah praktik politik uang dalam pemilu memiliki manfaat yang signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi. Praktik politik uang yang melibatkan suap, korupsi, atau penggunaan sumber daya finansial untuk mempengaruhi hasil pemilihan dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang manfaat dari mencegah politik uang dalam pemilu terhadap keberlangsungan demokrasi.

1. **Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat:** Mencegah politik uang membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ketika pemilu dilaksanakan dengan integritas dan tanpa campur tangan finansial yang merugikan, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga-lembaga politik dan proses pemilihan. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Integritas dalam pemilihan dan penghindaran praktik politik uang adalah faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
2. **Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan:** Mencegah politik uang memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketika kandidat atau partai politik menggunakan sumber daya finansial untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil, hal ini dapat mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan mencegah praktik politik uang, semua kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil dalam pemilihan. Mencegah politik uang membantu menjaga keadilan dalam pemilihan dan memastikan bahwa preferensi masyarakat secara keseluruhan diwakili dengan baik.
3. **Mendorong Partisipasi Aktif:** Mencegah politik uang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat yakin bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan bebas dari pengaruh finansial yang merugikan, mereka lebih cenderung terlibat dalam pemilihan sebagai pemilih yang sadar dan aktif. Masyarakat yang terlibat secara aktif memiliki kesempatan untuk

mempengaruhi keputusan politik melalui pemilihan yang berdasarkan informasi dan prinsip. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pemilihan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang politik dan memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk kebijakan publik.

4. **Membangun Sistem Politik yang Akuntabel:** Mencegah politik uang berkontribusi pada pembangunan sistem politik yang akuntabel. Dengan membatasi pengaruh finansial yang tidak sah dalam pemilihan, para pemimpin politik lebih bertanggung jawab kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan publik. Hal ini membantu membangun sistem politik yang transparan, dimana keputusan politik didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Upaya untuk mencegah politik uang memainkan peran penting dalam membangun sistem politik yang lebih akuntabel dan mengurangi risiko korupsi.

KESIMPULAN

Pemilu sebagai bagian penting dalam negara demokrasi khususnya Indonesia. Oleh sebab itu menciptakan pemilu dan pilkada yang berintegritas khususnya pada pemilu serentak tahun 2024 merupakan bagian tak terpisahkan dalam merawat dan menjaga marwah demokrasi yang sesungguhnya. Politik uang menjadi momok yang sering kali menjadi persoalan akut yang mengancam integritas pemilu. Oleh sebab itu diperlukan upaya konkrit dalam membangun kesadaran masyarakat, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) untuk benar-benar konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membangun pemilu cerdas dan berintegritas. Upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik transaksional atau politik uang adalah sebagai berikut: pertama, diperlukan adanya Pendidikan politik bagi masyarakat dan pihak terkait. kedua, kampanye Informasi yang sesuai dengan fakta. Dan ketiga, melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya sudah dibekali dengan pendidikan politik dan strategi pencegahan tindak pidana politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (n.d.). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Arrsa, Ria Casmi. "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11.3 (2014): 515-537.
- Asmawi, M., & Edi Sofwan, dan. (2021). Strategi badan pengawas pemilu kabupaten Serang dalam pencegahan praktik politik uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1).
- Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 167-182.
- Dairani, Dairani. "Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3.1 (2023): 346-363.
- Dairani, Dairani. "Upaya Konstitusional Dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik Pada Pemilukada Serentak Tahun 2024." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2.2 (2022): 199-210.
- Ghaliya, A., & Sjafrina, P. (n.d.). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43–53.
- Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Kurniawan, Kurniawan. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 7.2 (2021): 76-86.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (n.d.). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia.
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21.2 (2014): 23.
- Riwanto, A., Ummul Firdaus, S., & Wahyuni, S. (2021). Membangun model desa anti Politik uang sebagai strategi bawaslu dalam mencegah pilkada curang 1. *Jilid*, 50(3), 279–289.
- Samosir, Osbin, and Indah Novitasari. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2.3 (2022): 332-346.
- Sholikin, Ahmad. "Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Transformative* 5.1 (2019): 87-108.